

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT (*Studi Kasus di Desa Tadui Kecamatan
Mamuju Kabupaten Mamuju*)**

Ahmad¹, Muh Sabir Laba²

Agribisnis, Institut Teknologi & Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar

Email : ahmaddian214@gmail.com, sabirlaba@itbmpolman.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Mengacu pada bagaimana melakukan “wirausaha” (misalnya melalui industrial, penarikan pajak) guna memperoleh pendapatan financial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Perawatan masyarakat (*community care*). Merujuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam resiko yang mengancam kehidupannya (misalnya menderita sakit, terjerembab kemiskinan atau tertimpa bencana alam dan sosial serta Kurangnya penyediaan sumber daya manusia terlatih melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan terstruktur sesuai segmen budidaya

Tujuan penelitian ini adalah Keterlibatan pihak pemerintah dalam model pemberdayaan masyarakat petani rumput laut melalui pemberdayaan petani rumput laut diharapkan pembuat kebijakan dan pembinaan dapat memberikan banyak kontribusi bagi pengembangan budidaya rumput laut dan industri pengolahan pada khususnya. Metode penelitian ini adalah wawancara ke petani rumput laut analisis data yang di gunakan adalah kuantitatif hasil peneilian menunjukkan Program pemberdayaan masyarakat di tujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat dengan karakteristik kegiatan program yang bersifat pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kelautan dan perikanan sangat penting dan merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam rangka upaya mengatasi kemiskinan secara nasional termasuk di Desa Tadui sendiri melalui program penguatan modal dan usaha kelompok budidaya rumput laut. Serta penyuluhan budidaya. Masyarakat tadui sangat terbantu dengan program pemerintah sebelum masuknya program pemerintah maka pencarian utama petani adalah berkebun namun belum memenuhi kebutuhan keluarga, namun setelah berjalannya program ini tingkat perekonomian petani mengalami peningkatan sehingga budidaya rumput laut dapat dijadikan mata pencarian utama para petani.

Kata kunci : Kabupaten Mamuju, Petani Rumput Laut, Peningkatan Pendapatan dan Budidaya Rumput laut

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara mendasar salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia karena secara tegas telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah Negara Republik

Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Kegagalan dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan masyarakat untuk memahami realitas masyarakat. Pentingnya pembangunan dan pemberdayaan ini merupakan mekanisme pembangunan nasional yang menjadikan masyarakat pada akhirnya berperan sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan tindak lanjut, untuk itulah diperlukan payung hukum bagi penyelenggaraan sistem pembangunan nasional yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan spirit kebangsaan Indonesia yang tidak hanya dapat menjembatani konteks mikro ke dalam konteks makro tetapi juga sebaliknya menerjemahkan konteks makro ke dalam konteks mikro. Pentingnya memberikan mandat tentang keberpihakan pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan nasional yang memberikan peran aktif kepada masyarakat partisipatif.

Edi Suharto (2009), apabila fungsi pembangunan nasional disederhanakan maka dapat dirumuskan ke dalam tiga tugas utama yang harus dilakukan sebuah Negara-Bangsa, yakni :

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Mengacu pada bagaimana melakukan "wirausaha" (misalnya melalui industrial, penarikan pajak) guna memperoleh pendapatan financial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan.

Perawatan masyarakat (*community care*). Merujuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam resiko yang mengancam kehidupannya (misalnya menderita sakit, terjerembab kemiskinan atau tertimpa bencana alam dan sosial).

Pengembangan manusia (*human development*). Mengarah pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.

Optimal dan mampu bersaing di pasar global, maka ketiga aspek tersebut harus dicakup secara seimbang dan ditunjang oleh kebijakan yang dibuat oleh sosial pemerintah yang pro pembangunan nasional. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan ditandai dengan adanya kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dan pendapatan meningkat karena adanya peningkatan produksi yang selanjutnya membuka kesempatan kerja guna menciptakan pendapatan dan peluang bagi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. M Ryaas Rasyid menyatakan bahwa "salah satu fokus kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial ini adalah dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan selain dari pada fungsi pembangunan dan fungsi pelayanan".

Pelaksanaan pemberdayaan terdapat beberapa unsur (Heri Darwanto, 2008), yaitu :

Partisipasi, yang berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang dibedayakan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya

pembangunan (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli dll) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin.

Akses pada informasi, yaitu aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah.

Kapasitas organisasi lokal, yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada didalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang organized lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi.

Profesionalitas pelaku pemberdaya, yaitu kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah, LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi, dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat, 1997). Dalam memberdayakan masyarakat tentunya pemerintah berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat petani rumput rumput laut, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus merupakan mandat dalam pemanfaatan sumber daya

kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, sebagaimana pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam mendukung terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu "Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2014. Hal ini juga didukung pula oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju dirumuskan visi yaitu Terwujudnya pemanfaatan sumber daya Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan dan bertanggung jawab guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian lokal yang berlandaskan ekonomi kerakyatan serta bernafaskan keagamaan. Hal ini juga tertuang dalam tugas pokok dan rincian tugas jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju ditetapkan melalui peraturan Nomor 15 Tahun 2009. Sebagai pelaksana pemerintah daerah pada bidang kelautan dan perikanan maka Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat petani rumput laut ini dalam bentuk program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat petani rumput laut. Kurang lebih 70 persen wilayah Indonesia terdiri dari laut, yang pantainya kaya akan berbagai jenis sumber hayati, dan lingkungannya sangat potensial untuk dikembangkan. Keadaan ini merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan yang serasi dan seimbang dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Budidaya rumput laut memiliki peranan penting dalam usaha memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta memenuhi kebutuhan pasar, baik dalam maupun luar negeri, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani rumput laut serta menjaga kelestarian sumber hayati perairan. Untuk mencapai produksi yang maksimal diperlukan beberapa faktor pendukung, diantaranya pemakaian jenis rumput laut yang bermutu, teknik budidaya yang intensif, pasca panen yang tepat dan kelancaran hasil produksi (Laode, 1999). Rumput laut

merupakan salah satu komoditas hasil laut yang potensial untuk dikembangkan. Potensi rumput laut cukup besar dan tersebar hampir diseluruh perairan nusantara.

Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut Di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. yang sangat berpotensi dalam bidang perikanan budidaya. Posisi yang terletak di Kawasan Teluk Mamuju dengan panjang garis pantai \pm 15 km dengan luas wilayah Kabupaten Mamuju untuk kegiatan perkotaan sekitar 10 Km².

Penduduk Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. berdasarkan hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi (Sussenas) tahun 2013 berjumlah 2.986 jiwa memilih untuk membudidayakan rumput laut dengan alasan harga rumput laut dipasaran semakin meningkat dengan kata lain kian hari kian mahal harganya. Namun dalam realitasnya pengembangan budidaya rumput laut ini masih banyak ditemukan permasalahan yaitu :

Keterbatasan permodalan untuk membantu petani rumput laut yang membutuhkannya.

Keterbatasan penerapan dan alih teknologi budidaya rumput laut yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen yang berkualitas melalui penelitian, percontohan, pelatihan, magang dan penyuluhan.

Kurangnya penyediaan sumber daya manusia terlatih melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan terstruktur sesuai segmen budidaya.

Terbatasnya pola pengaman terpadu dengan mengikutsertakan masyarakat dalam segmen-segmen usaha, seperti pembibitan dan pembesaran.

Pengembangan budidaya rumput laut masih dilaksanakan sendiri-sendiri secara sektoral.

Kurangnya pelaku usaha yang berperan sebagai pelaku pemasaran produksi rumput laut pada tingkat lokal maupun antarpulau sehingga harga rumput laut masih di bawah standar dapat memengaruhi kemauan pembudidaya untuk melaksanakan kegiatan budidaya rumput laut.

Belum adanya kelembagaan pada tingkat petani budidaya rumput laut.

koordinasi antardinas dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan khususnya pada budidaya rumput laut dan penguatan modal serta peningkatan sistem monitoring, controlling dan survailance untuk memperoleh data kemajuan usaha budidaya rumput laut yang terpadu dengan baik dan akurat.

Pengembangan budidaya perikanan rumput laut ini diharapkan mampu pemberdayaan masyarakat petani rumput laut dan meningkatkan taraf hidup petani rumput laut. Maka dari itu program pengembangan budidaya rumput laut ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Mamuju. Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dapat menyadari kenyataan ini agar pemerintah daerah berupaya seoptimal mungkin untuk memajukan sektor riil berskala kecil. Tidak terkecuali pada sektor perikanan industri pengolahan budidaya rumput laut di Indonesia tergolong tinggi yaitu 23-47% dari hasil perikanan. Sebagian besar pengolahan budidaya rumput laut dikelola secara tradisional, hal ini dikarenakan pengolahan modern membutuhkan persyaratan yang sulit dipenuhi para petani rumput laut termasuk di dalamnya kualitas rumput laut yang bermutu tinggi dan teknologi pengelolaanya. Untuk ikut bersaing, industri pengolahan budidaya rumput laut skala kecil ini membutuhkan bantuan modal, pembinaan atau pelatihan serta bantuan pemasaran sehingga rumput laut ini dapat dikembangkan memiliki kualitas daya jual yang tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan pada para petani rumput laut yang berkelanjutan untuk menghasilkan produk

budidaya rumput laut yang ditinjau dari segi ekonomis menguntungkan dari segi teknis bisa dilaksanakan, sehingga pengembangan rumput laut ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun untuk pemerintah Kabupaten Mamuju itu sendiri.

Keterlibatan pihak pemerintah dalam model pemberdayaan masyarakat petani rumput laut melalui pemberdayaan petani rumput laut diharapkan pembuat kebijakan dan pembinaan dapat memberikan banyak kontribusi bagi pengembangan budidaya rumput laut dan industri pengolahan pada khususnya.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, karena sebagian besar warga di Desa Tadui berusahatani rumput laut. Dengan waktu penelitian dimulai bulan Agustus sampai bulan September 2015.

Populasi dan Sampel

Populasi ini adalah semua petani rumput laut di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang mengembangkan rumput laut, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang ditentukan berdasarkan persentase populasi yang dianggap dapat mewakili data hasil penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak sederhana (*simple random sampling*), dengan mengambil 10% sampel dari populasi yang ada (300 orang), sehingga sampel yang dijadikan responden sebanyak 30 orang.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari dua sumber, yaitu :

Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *in-depth interview* (wawancara mendalam), serta melakukan observasi (pengamatan langsung).

Data sekunder

Data pendukung bagi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan literatur seperti dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dimaksudkan bahwa penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Penelitian lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut :

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dan sesuai dengan tujuan penelitian serta direncanakan secara sistematis juga dapat dikontrol reliabilitas dan validitasnya.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara bertanya langsung atau mengadakan proses tanya jawab, dialog atau percakapan dengan informan yang dipilih untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam terkait dengan masalah yang akan diteliti. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a). Informan Pemerintah yang penulis wawancarai yaitu:

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju sebagai orang yang bertanggung jawab. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Kabupaten Mamuju sebagai orang yang bertanggung jawab.

Kepala BPP (Badan Pertahanan Pangan) Kabupaten Mamuju sebagai orang yang bertanggung jawab.

Penyuluh Perikanan Desa Tadui sebagai orang yang bertanggung jawab.

b). Informan dari masyarakat adalah masyarakat yang terkait dalam petani rumput laut yaitu:

KUB (Kelompok Usaha Bersama) sebagai masyarakat yang diberdayakan.

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja dan berkembang terus (*snowball*) tanpa menentukan jumlah sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan dan informasi mengalami titik jenuh. Informan yang terpilih hanyalah yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan yang diteliti.

Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang akan mendukung penelitian melalui berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu upaya untuk mengurutkan data dalam bentuk kata-kata secara sistematis sehingga dapat dimengerti dan dipahami. Oleh karena itu dalam analisis kualitatif perlu dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kemudian reduksi data dalam analisis kualitatif sebagai proses pemilihan data kualitatif. Proses reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data bukanlah proses yang sekali jadi, tetapi proses yang berulang selama proses penelitian ini berlangsung. Penyajian data yang lebih baik merupakan salah satu cara utama bagi analisis bagi kualitatif yang valid dan kemudian membangun proposisi (kaitan antara konsep) dengan menghimpun sejumlah hubungan interaksi antara masyarakat petani rumput laut dengan pemerintah Kabupaten Mamuju.

Maka dalam mereduksi data peneliti memfokuskan pada pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani rumput laut yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani rumput laut. Langkah berikutnya setelah direduksi adalah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

Konsep Operasional

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian sebagai berikut:

Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan) sebagai pelaksana pemerintahan Kabupaten Mamuju di bidang Kelautan dan Perikanan serta pengambil kebijakan yang ada di daerah Mamuju dalam pemberdayaan masyarakat petani rumput laut. Hal ini dapat diukur dari beberapa indikator:

Pelaksanaan pemberdayaan petani rumput laut berupa kegiatan atau program. Program-program Dinas Kelautan dan Perikanan yang dimaksudkan adalah:

- Penguatan modal dan usaha kelompok budidaya rumput laut
- Pengembangan Budidaya Rumput Laut
- Penyuluh Budidaya
- Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat petani rumput laut dalam upaya untuk memberdayakan petani rumput laut.

Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani rumput laut yaitu:

- Sumber daya aparatur, jumlah tenaga ahli penyuluh
- Anggaran, biaya yang disediakan pemerintah untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut.
- Sosialisasi, upaya yang dilakukan dalam memperkenalkan atau menyebarkan informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat itu sendiri kepada masyarakat
- Partisipasi Masyarakat, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap

tahapan kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut.

- Keberadaan sarana dan prasarana dalam suatu dinas merupakan salah satu modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Potensi Budidaya Perikanan, Potensi rumput laut yang dimiliki Desa Tadui dalam mengembangkan budidaya dan membangun ekonomi masyarakat petani rumput laut.

KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Desa Tadui dengan luas wilayah 45,38 Km², adalah Desa yang paling ujung sebelah utara Kecamatan Mamuju dan berbatasan dengan Kecamatan Kalukku yaitu 14 Km dari ibu Kota Kecamatan.

Letak geografis Desa Tadui adalah sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Bebanga, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bambu, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Tabel 1. Luas wilayah Desa Tadui Kecamatan Mamuju

No	Nama Dusun	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Tadui	6,827	15.04
2	Bambu	5,00	11.02
3	Lalawang	10,127	22.32
4	Salutalawar	5,026	11.08
5	Pangondoang	7,00	15.43
6	Manalisse	6,20	13.66
7	Lempo	5,200	11.46
	Jumlah	45,38	100

Sumber : Kantor Desa Tadui, 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dusun yang paling luas adalah Dusun Lalawang yaitu seluas 10,127 km² atau 22,32 persen dari luas wilayah Desa Tadui. Sedangkan Dusun Bambu adalah merupakan Dusun yang paling sempit yaitu hanya seluas 5,00 km² atau 10,02 persen dari total luas wilayah Desa Tadui.

4.2. Penggunaan Tanah dan Pantai

Desa Tadui mempunyai topografi datar pada pesisir dan sebagian berbukit dan pegunungan pada ketinggian 0 –

1400 M di atas permukaan laut Penggunaan tanah di Desa Tadui adalah untuk tanaman semusim dan tanaman tahunan sedangkan penggunaan pesisir pantai untuk budidaya rumput laut dan penangkapan ikan.

4.3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tadui sebanyak 2.871 jiwa, terdiri dari 1.414 jiwa penduduk Laki-laki dan 1.457 jiwa Perempuan, kepadatan Penduduk 43 jiwa/km untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.

Tabel 2. Keadaan Penduduk Desa Tadui Kecamatan Mamuju.

No	Nama Dusun	KK	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Tadui	57	125	149	274
2	Bambu	59	137	151	288
3	Lalawang	73	139	160	299
4	Salutalawar	107	264	250	514
5	Pangondoang	113	274	288	562
6	Manalisse	136	322	310	632
7	Lempo	68	153	149	302
Jumlah			1.414	1.457	2.871

Sumber: Kantor desa Tadui, 2015.

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa Dusun Manalisse merupakan Dusun yang penduduknya yang paling banyak yaitu 632 jiwa yang terdiri dari 322 jiwa penduduk Laki-laki dan 310 jiwa penduduk Perempuan, sedangkan Dusun Tadui hanya 274 jiwa, yang terdiri dari 125 jiwa penduduk Laki-laki dan 274 penduduk Perempuan.

4.4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dan pengetahuan seseorang mempengaruhi pola pikir dalam mengelola usahatannya, dan juga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur maju tidaknya suatu masyarakat karena tingkat pendidikan dan pengetahuan yang relatif tinggi maka masyarakat akan lebih mudah menyerap Inovasi-inovasi baru yang muncul dibanding dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Untuk mengetahui tingkat pendidikan di Desa Tadui dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Tadui Kecamatan Mamuju

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Belum/Tidak SD	849	29,6
2	SD	1171	40,8
3	SLTP	591	20,6
4	SLTA	146	5,1
5	Sarjana/Diploma	114	4,0
Jumlah		2.871	100

Sumber : Kantor Desa Tadui, 2015

Data di atas menunjukkan bahwa umumnya penduduk Desa Tadui

berpendidikan SD yaitu dengan berjumlah 1.171 jiwa atau 40,8 persen, sedangkan jumlah yang yang paling rendah adalah Sarjana dan Diploma yang hanya berjumlah 114 orang atau 4,0 persen dari jumlah penduduk Desa Tadui.

4.5. Jenis Pekerjaan

Penduduk di Desa Tadui mempunyai mata pencaharian yang umumnya adalah petani dan nelayan dan merupakan mata pencaharian pokok bagi masyarakat Desa Tadui, hal tersebut dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 4. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1.	Petani	972
2.	Nelayan	152
3.	Pegawai Negeri Sipil	18
4.	Industri	32
5.	Pedagang	18
6.	Angkutan	6
7.	Pertukangan	19
Jumlah		1.217

Sumber : Data Kantor Desa Tadui, 2015

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk yang paling banyak bermata pencaharian sebagai petani adalah 972 jiwa atau 79,87 persen, sedangkan yang bermata pencaharian yang paling sedikit adalah supir angkutan yang hanya berjumlah 6 jiwa atau 0,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tadui pada umumnya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian.

4.6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan faktor penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena sangat berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan, sarana dan pra sarana adalah salah satu faktor yang dapat menunjang dan memperlancar pembangunan sehingga diperlukan kelengkapannya dalam berbagai kegiatan masyarakat baik di sektor pertanian maupun sektor lain. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Desa Tadui dapat di lihat pada Tabel berikut :

Tabel 5. Jenis Sarana dan Prasarana di Desa Tadui Kecamatan Mamuju

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Sarana Perhubungan	33
2.	Sarana Komunikasi	850
3.	Sarana Transportasi	403
4.	Sarana Sosial Budaya	19
5.	Sarana Ekonomi	51
6.	(Kios)	7
Sarana Ibadah		
Jumlah		1.363

Sumber : Kantor Desa Tadui, 2015

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa informasi mengenai rumput laut baik budidaya, pengolahan, panen dan penanganan pasca panen dapat diketahui oleh petani dengan adanya sarana Komunikasi dan transportasi yang merupakan sarana yang dominan di Desa Tadui.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Program pemberdayaan masyarakat di tujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat dengan karakteristik kegiatan program yang bersifat pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kelautan dan perikanan sangat penting dan merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam rangka upaya mengatasi kemiskinan secara nasional termasuk di Desa Tadui sendiri melalui program penguatan modal dan usaha kelompok budidaya rumput laut. Serta penyuluhan budidaya.

Masyarakat tadui sangat terbantu dengan program pemerintah sebelum masuknya program pemerintah maka pencarian utama petani adalah berkebun namun belum memenuhi kebutuhan keluarga, namun setelah berjalannya program ini tingkat perekonomian petani mengalami peningkatan sehingga budidaya rumput laut dapat dijadikan mata pencarian utama para petani.

Tingkat pengetahuan para petani yang berada di Desa Tadui masih sangat minim mengenai pembudidayaan komoditi rumput laut sehingga proses budidaya masyarakat setempat masih bersifat tradisional.

Masyarakat petani rumput laut di Desa Tadui berjalan lambat perkembangannya karena terkendala oleh modal yang digunakan dalam proses budidaya.

Saran

Pemerintah daerah sebaiknya mengundang pihak swasta untuk membangun industri pengolahan hasil perikanan sehingga rumput laut tidak hanya dijual mentah tapi dapat diolah menjadi produk-produk makanan ataupun kosmetik. Pihak Swasta diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha dan juga untuk mengambil peran dalam pengembangan industri perikanan karena kemampuan pemerintah dalam hal pemasaran yang terbatas.

Pemerintah perlu melakukan rekrutmen pegawai dalam bidang penyuluh perikanan, melihat tenaga teknis ini sangat kurang.

Memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai bantuan program dan prosedurnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan

informasi kepada para petani rumput laut agar dapat mengembangkan budidaya perikananannya.

Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan yang semaksimal mungkin maka ke depan perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan tergantung pada partisipasi seluruh stakeholders perikanan dan kelautan selain itu keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan sistem pelaksanaan yang *bottom up* dengan senantiasa mempertimbangkan aspirasi dari bawah utamanya pembudidaya rumput laut sebagai objek pembangunan perikanan dan kelautan

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukmianto. 2008. *Mencapai Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Ahmad.A.K,Drs. 2006, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, Reality pulisher

Arifin, Indar. 2010. *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo*. Pustaka Refleksi: Makassar.

Culla, Adi Suryadi. 2002, *Masyarakat Madani: Pemikiran Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fahrudin, Adi. *Pemberdayaan, Partisipasi, Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora: Bandung.

Kansil, C.T.S. 1991, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta

Kencana Syafiiie, Inu, 2007, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.

Koswara, E. 2001, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Pariba.

Kusumastanto, T. 1998. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Berbasis Masyarakat*. Ditjen, Bogor.

Muluk, Khairul,M.R. 2007, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Banyumedia Publising.

Mulyadi. 2007. *Ekonomi Kelautan*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Narayang, Deepa. 2002, *Empowerment and Poverty Reduction*. Washington DC: The World Bank.

Salman Darmawan. 2002, *Apa Bagaimana Pemberdayaan*

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta: Bandung.

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. PT Refika Aditama: Bandung.

Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta: Bandung.

Situs Resmi Kementerian Kelautan Dan Perikanan” <http://www.dkp.go.id>
Masyarakat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas”.html